

Peran Pancasila sebagai Pedoman Etika dalam Praktik Politik Indonesia

ABSTRACT

Pancasila, as the foundation of the state and the nation's ideology, plays a crucial role in shaping the direction and ethics of political practice in Indonesia. The values it embodies—from Belief in God, Humanity, Unity, Democracy, to Social Justice—serve as a moral foundation that should guide the behavior of political actors in carrying out their duties and authorities. Through internalization of these values, politics can be conducted humanely, with integrity, and oriented towards the interests of the people. Pancasila serves not only as an abstract norm, but also as a guideline capable of shaping a civilized and democratic political culture. Amidst contemporary political dynamics, the application of Pancasila-based political ethics is increasingly crucial to prevent polarization, the practice of identity politics, and actions that have the potential to undermine public trust. Pancasila provides an ethical framework to maintain a balance between political freedom and social responsibility, ensuring that the political process remains inclusive, fair, and transparent. Therefore, strengthening commitment to the values of Pancasila is key to building a political system with integrity and supporting good governance in Indonesia.

Keywords: Pancasila; Political Ethics; Indonesian Political Practice.

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa memiliki peran penting dalam membentuk arah dan etika praktik politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya—mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, hingga Keadilan Sosial—menjadi fondasi moral yang seharusnya memandu perilaku para aktor politik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, politik dapat dijalankan secara humanis, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi juga sebagai pedoman yang mampu membentuk budaya politik yang beradab dan demokratis. Di tengah dinamika politik kontemporer, penerapan etika politik berbasis Pancasila menjadi semakin penting untuk mencegah polarisasi, praktik politik identitas, serta tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Pancasila memberikan kerangka etis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan tanggung jawab sosial, sehingga proses politik tetap berjalan secara inklusif, adil, dan transparan. Dengan demikian, penguatan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila merupakan kunci penting dalam membangun sistem politik yang berintegritas serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila; Etika Politik; Praktik Politik Indonesia.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki posisi sentral dalam mengarahkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk bidang politik. Sejak awal perumusannya, Pancasila dirancang untuk menjadi landasan moral dan filosofis yang dapat memandu penyelenggaraan negara agar tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dalam konteks politik, keberadaan Pancasila diharapkan mampu menciptakan praktik politik yang bersih, beretika, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut sering kali tidak sepenuhnya hadir dalam dinamika politik yang berlangsung.

Dalam perkembangan politik modern berbagai tantangan seperti praktik korupsi, politik identitas, polarisasi, dan penyalahgunaan kekuasaan kerap muncul dan menguji komitmen bangsa terhadap Pancasila. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya jarak antara idealisme Pancasila dan praktik politik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila dan tindakan para aktor politik menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan politik bangsa.

Selain itu perkembangan teknologi dan era digital juga membawa dinamika baru dalam praktik politik Indonesia. Informasi yang mudah menyebar, maraknya ujaran kebencian serta manipulasi opini publik melalui media sosial semakin menantang kualitas etika dalam berpolitik. Di tengah arus globalisasi ini Pancasila sebenarnya dapat menjadi kompas etis yang membantu masyarakat dan aktor politik dalam menyaring informasi serta menjaga stabilitas demokrasi. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali terbentur oleh kepentingan pragmatis kelompok tertentu.

Upaya membangun sistem politik yang beretika memerlukan komitmen kolektif dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Pendidikan politik berbasis Pancasila menjadi salah satu kunci penting dalam menumbuhkan budaya politik yang matang dan beradab. Melalui pemahaman mendalam

terhadap nilai Pancasila masyarakat diharapkan mampu menjadi pemilih yang kritis sekaligus pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Di sisi lain partai politik dan pejabat publik harus mempraktikkan etika politik yang selaras dengan nilai-nilai tersebut agar kepercayaan publik dapat terjaga.

Dengan demikian penguatan peran Pancasila sebagai pedoman etika politik menjadi sangat relevan dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Pancasila menyediakan kerangka moral yang dapat menyeimbangkan antara kebebasan politik dan tanggung jawab sosial. Pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik politik Indonesia sangat diperlukan untuk memahami tantangan serta merumuskan solusi yang lebih efektif.

1. Bagaimana peran Pancasila dalam membentuk etika politik di Indonesia saat ini?
2. Apa saja faktor yang menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik modern?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan politik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis peran Pancasila sebagai pedoman etika dalam praktik politik Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, undang-undang, serta artikel akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep, nilai, dan prinsip Pancasila serta membandingkannya dengan realitas praktik politik yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan etika politik, serta memahami tantangan dan peluang penerapannya dalam konteks politik Indonesia kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana peran Pancasila dalam membentuk etika politik di Indonesia saat ini?

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan strategis dalam membentuk etika politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral dan arah bagi setiap aktor politik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam konteks politik modern yang semakin kompleks, Pancasila berfungsi sebagai kompas untuk menjaga agar praktik politik tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa dan tidak terjebak pada kepentingan sempit (Rasyid dkk, 2024). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan etis bahwa setiap tindakan politik harus dilandasi integritas moral dan tanggung jawab spiritual. Hal ini mendorong para pejabat publik, partai politik, dan pemimpin pemerintahan untuk menghindari kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Etika politik berdasarkan sila pertama menekankan bahwa kekuasaan bukan sekadar alat, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab (Ariawantara, 2016).

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memperkuat nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar pengambilan keputusan politik. Etika politik yang bersumber dari sila ini menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil kepada seluruh warga, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, kebijakan negara harus berpihak pada martabat manusia dan melindungi kelompok rentan. Sila Persatuan Indonesia berperan penting dalam menjaga harmoni kehidupan politik. Dalam situasi politik yang sering kali dipenuhi kontestasi, narasi identitas, dan potensi polarisasi Pancasila mengingatkan bahwa kepentingan persatuan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan golongan.

Etika politik berdasarkan sila ini mengarahkan para pelaku politik untuk menghindari praktik politik identitas yang memecah belah serta mengedepankan rasa kebersamaan sebagai bangsa (Pratama dkk, 2023). Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi yang berkeadaban. Hasil dari konstruksi sejarah yang terbentuk dari perjuangan kolektif melawan penjajahan bukan sekadar kesepakatan administratif belaka. Secara filosofis persatuan yang terdapat dalam Pancasila tidak berdiri sebagai entitas yang terpisah melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua) dan keadilan sosial (sila kelima). Persatuan bersifat non-koersif tetapi muncul dari kesadaran akan kemanusiaan dan rasa keadilan dalam hidup bersama (Hasan, 2023).

Etika politik yang muncul dari sila ini mengedepankan musyawarah, dialog, dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Artinya demokrasi Indonesia bukan semata-mata tentang perebutan suara mayoritas tetapi proses partisipatif yang menjunjung keadilan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap berbagai pendapat (Zuhri, 2020). Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan landasan etis bahwa kebijakan dan tindakan politik harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Para pemimpin dan pembuat kebijakan diharapkan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas bukan kepentingan elit atau kelompok tertentu. Etika politik ini menuntut pemerintahan yang berpihak pada keadilan, distribusi sumber daya yang merata serta keberpihakan pada masyarakat yang kurang mampu. Meskipun Pancasila telah menjadi pondasi utama etika politik tantangan implementasi masih sering muncul. Praktik politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik berbasis identitas masih menjadi masalah yang menghambat terwujudnya etika politik yang ideal (Nurhasanah, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila perlu terus diperkuat baik melalui pendidikan politik, keteladanan pemimpin maupun penegakan hukum yang konsisten. Secara keseluruhan Pancasila tetap memainkan peran penting dalam membentuk etika politik di Indonesia saat ini. Nilai-nilainya memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan proses politik agar tetap mencerminkan keadaban, keadilan, dan persatuan bangsa. Dengan komitmen bersama untuk mengamalkannya, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral yang menjaga kualitas dan integritas kehidupan politik Indonesia.

Apa saja faktor yang menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik modern?

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik modern menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Meskipun Pancasila telah dijadikan dasar negara dan pedoman moral implementasinya sering kali tidak konsisten. Politik modern yang kompetitif dan pragmatis memunculkan berbagai perilaku yang tidak selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Salah satu hambatan utama adalah maraknya praktik politik uang yang menggeser nilai moral dalam proses demokrasi. Politik uang membuat relasi antara pemimpin dan rakyat menjadi transaksional bukan berbasis kepercayaan dan etika. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang diajarkan oleh Pancasila (Haboddin, 2014).

Selain itu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi faktor dominan yang menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila. Korupsi melemahkan integritas pejabat publik dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Ketika kekuasaan dijalankan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi terabaikan. Polarisasi politik dan meningkatnya politik identitas turut memperburuk situasi. Dalam era digital isu-isu SARA sering dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral sehingga memicu konflik horizontal di masyarakat. Fenomena ini jelas bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan.

Rendahnya keteladanan dari sebagian pemimpin politik juga menjadi hambatan serius. Banyak pejabat publik yang tidak mencerminkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam perilakunya. Ketika pemimpin tidak memberikan contoh yang baik masyarakat cenderung mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan politik. Budaya patronase, nepotisme, dan politik balas budi turut menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila. Budaya ini menempatkan kedekatan pribadi di atas kemampuan dan meritokrasi, sehingga merusak prinsip keadilan serta menciptakan

ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan politik. Sistem semacam ini bertolak belakang dengan esensi sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Latif, 2018).

Minimnya pendidikan politik dan pemahaman mendalam mengenai Pancasila di kalangan masyarakat dan elit politik juga menjadi penyebab lemahnya implementasi nilai-nilainya. Banyak pihak memahami Pancasila hanya sebagai simbol atau hafalan bukan sebagai pedoman moral yang harus diinternalisasi dalam tindakan nyata (Latif, 2018). Kurangnya literasi politik membuat masyarakat mudah terpengaruh hoaks, provokasi, dan manipulasi politik. Secara keseluruhan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam politik modern terhambat oleh kombinasi masalah etika, budaya, struktur kekuasaan, dan literasi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan pemberian sistem politik, penguatan lembaga-lembaga demokrasi, pendidikan karakter serta keteladanan dari para pemimpin. Dengan komitmen bersama Pancasila dapat kembali menjadi pedoman utama yang menuntun praktik politik menuju kehidupan berbangsa yang lebih bermoral dan berkeadaban (Zuhro, 2015).

Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan politik Indonesia

Memperkuat Pancasila sebagai pedoman etika politik memerlukan upaya sistematis yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dalam konteks politik modern yang dinamis Pancasila harus diposisikan bukan sebagai dokumen historis tapi juga sebagai nilai hidup yang membimbing perilaku para aktor politik (Kaelan, 2013). Strategi penguatan Pancasila harus menyasar pembinaan moral, penguatan institusi serta modernisasi budaya politik. Salah satu strategi utama adalah peningkatan pendidikan politik berbasis nilai Pancasila. Pendidikan politik tidak hanya diberikan melalui sekolah tapi juga melalui lembaga sosial, media, dan partai politik. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap esensi Pancasila warga negara akan lebih kritis terhadap perilaku politik yang tidak etis serta mampu berpartisipasi dalam demokrasi

secara bertanggung jawab (Aminuddin, 2018)

Strategi berikutnya adalah memperkuat keteladanan dari para pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemimpin yang jujur, adil, dan berintegritas akan lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dibandingkan sekadar sosialisasi formal. Keteladanan merupakan salah satu bentuk pendidikan moral paling ampuh sehingga pembentukan karakter elit politik menjadi keharusan dalam menciptakan budaya politik yang sehat. Penguatan sistem hukum dan lembaga pengawas juga sangat penting untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dijalankan secara konsisten. Lembaga seperti KPK, Bawaslu, dan Ombudsman perlu diberi kewenangan dan dukungan yang kuat untuk menegakkan integritas dan etika politik. Dengan penegakan hukum yang tegas praktik korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir (Zuhro,2015)

Selain penguatan hukum reformasi partai politik menjadi strategi penting dalam membumikan nilai Pancasila. Partai politik sebagai agen rekrutmen pemimpin harus memastikan bahwa kader-kadernya memiliki integritas, pemahaman nilai serta komitmen terhadap etika publik. Transparansi pendanaan partai, mekanisme seleksi kader berbasis meritokrasi dan pendidikan ideologi secara berkelanjutan akan memperkuat internalisasi nilai Pancasila dilingkungan elit politik. Pemanfaatan media dan teknologi informasi secara positif dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat Pancasila di ruang publik. Kampanye digital, konten edukatif hingga narasi positif tentang toleransi, persatuan, dan keadilan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai Pancasila. Di sisi lain peningkatan literasi digital diperlukan untuk melindungi masyarakat dari hoaks dan politik kebencian yang dapat melemahkan nilai persatuan.

Peran masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan komunitas pemuda juga sangat penting dalam memperkuat etika politik berbasis Pancasila. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses politik dan pemerintahan dapat menekan perilaku politik yang tidak sesuai dengan nilai etika (Herdiansyah, 2016). Komunitas sipil yang kuat

menciptakan ruang publik yang sehat sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terus dipertahankan dan juga memperkuat Pancasila sebagai pedoman etika politik (Hakim, 2020).

KESIMPULAN

Pancasila memiliki kedudukan strategis sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral dalam praktik politik Indonesia dengan nilai-nilainya yang membimbing perilaku aktor politik agar proses politik berjalan beradab, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan bangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan integritas moral dalam politik sementara Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sila Persatuan Indonesia menjaga harmoni politik di tengah potensi polarisasi dan Sila Kerakyatan mengarahkan proses demokrasi agar mengedepankan musyawarah, kebijaksanaan, dan partisipasi publik. Sila Keadilan Sosial menuntut pemerataan kesejahteraan serta penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif. Namun praktik politik Indonesia masih menghadapi tantangan berupa korupsi, politik uang, patronase, polarisasi, dan kurangnya keteladanan pemimpin. Karena itu, penguatan pendidikan politik berbasis Pancasila, keteladanan elit, penegakan hukum, reformasi partai serta pemanfaatan teknologi informasi yang positif menjadi langkah penting untuk meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Secara keseluruhan implementasi Pancasila yang konsisten melalui pendidikan, keteladanan, hukum, dan partisipasi publik menjadi syarat utama bagi terciptanya sistem politik yang adil, berintegritas dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. “Penguatan Nilai Pancasila dalam Budaya Politik Indonesia.” *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Hasan, Z. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV. Alinea Edumedia.
- Haboddin, M. (2014). Politik identitas dan ancaman terhadap demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 193–207.
- Hasan, Z. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV. Alinea Edumedia.
- Herdiansyah, H. (2016). Perilaku politik dan etika publik dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 22–31.
- Kaelan.“Pancasila dan Etika Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, No. 2, 2013.
- Latif, Y. (2018). Aktualisasi Pancasila dalam tantangan global dan politik identitas. *Jurnal Ketatanegaraan*, 5(2), 44–56.
- Latif, Y. (2018). *Pancasila sebagai Kompas Moral Bangsa di Era Kontemporer*. Jurnal Ketatanegaraan, 5(2), 44–56.
- Lukman Hakim. “Reformasi Partai Politik dan Implementasi Pancasila dalam Etika Politik.” *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Nurhasanah, N. (2019). *Pancasila, Patronase, dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Jurnal Pemerintahan Daerah, 4(1), 33–47.
- Siti Zuhro. “Tantangan Demokrasi dan Integritas Politik di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik*, LIPI, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Zuhri, S. (2020). *Implementasi Nilai Pancasila dalam Politik Era Modern: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 6(1), 15–28.
- Zuhro, R. S. (2015). Demokrasi, korupsi, dan tantangan tata kelola politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 12(1), 1–15.